

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Profil Pemerintah Kota Yogyakarta

2.1.1 Visi Misi

a. Visi Kota Yogyakarta

Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaaan.

b. Misi Kota Yogyakarta

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan.
6. Membangun sarana dan Prasarana publik dan pemukiman.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

2.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta

2.2.1 Kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta

Kedudukan Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta

Tugas pokok dan fungsi pemerintah Kota Yogyakarta menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan-urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, ada 26 urusan wajib yang diampu oleh 37 SKPD/Unit Kerja dan 8 urusan pilihan yang diampu oleh 4 SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan harapan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat lebih berperan dan lebih mampu dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab.

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Daerah dimaksud telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Yogyakarta yang bertujuan mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel. Adapun tugas pokok dan fungsi SKPD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

c. Dinas Daerah

Sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis sebagai unsur penunjang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidangnya dengan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Penyediaan pelayanan penunjang.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kecamatan

Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan.

f. Kelurahan

Pemerintah Kelurahan di Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dengan fungsi Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tabel 2.1

Pembagian Luas Wilayah Kecamatan di Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Luas Km ²	Persentasi
1	Matntrijeron	2,61	8,03
2	Kraton	1,40	4,31
3	Mergangsan	2,31	7,11
4	Umbulharjo	8,12	24,98
5	Kotagede	3,07	9,45
6	Gondokuman	3,99	12,28
7	Danurejan	1,10	3,38
8	Pakualaman	0,63	1,94
9	Gondomanan	1,12	3,45
10	Ngampilan	0,82	2,52
11	Wirobrajan	1,76	5,42

12	Gedongtengen	0,96	2,95
13	Jetis	1,70	5,23
14	Tegalrejo	2,91	8,95
	JUMLAH	32,50	100,00

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2015

Dapat dilihat pada tabel diatas, Kota Yogyakarta mempunyai 14 Kecamatan, wilayah yang mempunyai lahan luas yaitu Kecamatan Umbulharjo yang luasnya 8,12 Km² atau sekitar 25 % dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Dan Kecamatan yang memiliki lahan paling sempit yaitu Kecamatan Pakualaman yang luas wilayahnya hanya seluas 0,63 Km² atau sekitar 1.9 % dari luas wilayah Kota Yogyakarta.

2.3 Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

2.3.1 Kedudukan KPU Kota Yogyakarta

KPU Kota Yogyakarta adalah lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. KPU kabupaten/kota dipimpin oleh ketua yang juga merangkap sebagai anggota, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

2.3.2 Tugas Pokok KPU Kota Yogyakarta

KPU kabupaten/kota mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota. Adapun tugas KPU Kota Yogyakarta adalah:

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemilu.
- b. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu.

- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu.
- d. Menetapkan peserta pemilu.
- e. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPRD Propinsi Kabupaten/Kota, serta DPD.
- f. Menetapkan tanggal, waktu tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara.
- g. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD Propinsi serta DPRD Kabupaten/Kota.
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu.
- i. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur Undang-undang.

2.3.3 Fungsi KPU Kota Yogyakarta

Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kota Yogyakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan anggaran pemilu di Kabupaten/Kota.
- b. Pemberian pelayanan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten/Kota.
- c. Pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan anggaran.
- d. Perumusan dan penyusunan bantuan serta penyelesaian masalah sengketa hukum.

- e. Pemberian dan pelayanan informasi pemilu, partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat bagi keperluan pemilu di Kabupaten/Kota.
- f. Pengelolaan data pemilu di Kabupaten/Kota, pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan pemilu.
- g. Pengelolaan data pemilu di Kabupaten/Kota.
- h. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga
- i. Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota.

2.3.4 Struktur KPU Kota Yogyakarta

a. Anggota KPU Kota Yogyakarta

- 1. Wawan Budiyanto, S.Ag, MSI
- 2. Hidayat Widodo, S.IP
- 3. R. Moeh N. Aris Munandar, SE.
- 4. Sri Surani, SP
- 5. Siti Nurhayati, S.S.

b. Profil Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

- 1. Ka. Sub Bag. Umum Indradi Yohananto, SH.
- 2. Ka. Sub Bag. Hukum Purbaningsih, SH.
- 3. Ka. Sub Bag. Teknis Pemilu & Hupmas Warisna Wijaya, S.IP.
- 4. Ka. Sub Bag. Program dan Data Yurnelis Piliang, S.IP., MPA.

Tabel 2.2
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA 2017

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	
		L	P
1	Danurejan	7.984	8.390
2	Gedongtengen	7.210	7.860
3	Gondokusuman	14.717	16.174
4	Gondomanan	5.553	6.094
5	Jetis	9.339	10.215
6	Kotagede	11.133	11.921
7	Kraton	8.125	8.992
8	Mantrijeron	12.354	13.307
9	Mergangsan	11.362	12.519
10	Ngampilan	6.134	6.764
11	Pakualaman	3.943	4.481
12	Tegalrejo	12.714	13.637
13	Umbulharjo	22.903	24.780
14	Wirobrajan	9.836	10.548
	Jumlah	143.307	155.682

Sumber : KPU Kota Yogyakarta 2017

Tabel 2.3

JUMLAH TPS PADA PILWALI KOTA YOGYAKARTA 2017

No	Kecamatan	Jumlah TPS
1	Danurejan	51
2	Gedongtengen	46
3	Gondokusuman	82
4	Gondomanan	29
5	Jetis	43
6	Kotagede	65
7	Kraton	44
8	Mantrijeron	69
9	Mergangsan	73
10	Ngampilan	32
11	Pakualaman	22
12	Tegalrejo	61
13	Umbulharjo	134
14	Wirobrajan	43
	JUMLAH TOTAL	794

Sumber : KPU Kota Yogyakarta 2017

Pada saat hari pelaksanaan KPU Kota Yogyakarta menyediakan temflet di setiap TPS yang berjumlah 794 dan disetiap masing-masing kecamatan. KPU juga memastikan bahwa para petugas di TPS untuk menyiapkan bantuan bagi para pemilih penyandang disabilitas seperti penyandang disabilitas Tuna Netra. Hal ini bertujuan agar setiap TPS akses bagi pemilih penyandang disabilitas ikut berpartisipasi pada pemilu dan menggunakan hak pilihnya.

Tabel 2.4
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILWALI
KOTA YOGYAKARTA 2017

NO	URAIAN			
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
A	Data Pemilih	L	P	JUMLAH
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	143.307	155.682	298.989
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	432	384	816
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb)	1.025	1.184	2.209
	3. Jumlah Pemilih (1+2+3)	144.764	157.250	302.014
B	DATA PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	97.166	113.771	210.937
	2. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	369	319	688
	3. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb)	1.025	1.184	2.209
	4. Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2+3)	98.560	115.274	213.834
C	TINGKAT PARTISIPASI DALAM PRESENTASE (%)	68,1 %	73,4 %	70,9 %

Sumber : KPU Kota Yogyakarta 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah pemilih dan pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan. Jumlah total pemilih laki-laki dan perempuan yaitu sebanyak 302.014 dan jumlah total pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan yaitu sebanyak 213.834, dengan presentase tingkat partisipasi pemilih laki-laki dan

perempuan yang menggunakan hak pilihnya yaitu sebesar 70.9 % yang memilih, serta 29.1 % yang tidak menggunakan hak pilihya.